

IMPLEMENTASI TUGAS -TUGAS POKOK
KOMISI PENANGGULANGAN “*ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME*” (AIDS) DAERAH (KPAD) DALAM PENANGGULANGAN
HIV/AIDS
DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2009



TESIS

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat Sarjana S2

Program Studi
Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Oleh :

Rijadi Azikin
NIM : E4A007049

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2009

Universitas Diponegoro

Program Pascasarjana
Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
2009

ABSTRAK

Rijadi Azikin

Implementasi Tugas-tugas Pokok Komisi Penanggulangan "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (AIDS) Daerah (KPAD) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan Tahun 2009

x + 83 halaman + 15 tabel + 3 gambar + 3 lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2007 Bab II pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk penanggulangan HIV/AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi di wilayah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten/Kota. Pembentukan KPAD Kabupaten Grobogan beserta Sekretariatnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 443.2/416/2007 tanggal 23 April 2007, mempunyai 6 (enam) tugas pokok dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Hasil telaah dokumen, KPAD Kabupaten Grobogan belum menjalankan tugas-tugas pokoknya seperti yang diharapkan.

Tujuan penelitian ini menjelaskan implementasi tugas pokok KPAD Kabupaten Grobogan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini termasuk non-eksperimental yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada Ketua Sekretariat KPAD dan 9 anggota KPAD Kabupaten Grobogan sebagai informan utama, Wakil Ketua II KPAD dan Sekretaris I KPAD sebagai informan Triangulasi.

KPAD Kabupaten Grobogan menjalankan tugas pokoknya dalam bentuk : 1) Menyusun Renstra Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Grobogan tahun 2008-2012 dan sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota, namun belum ada kesepakatan untuk mendukung realisasi renstra ; 2) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi HIV/AIDS belum didukung peran aktif anggota KPAD lainnya; 3) Pembentukan pokja belum ada realisasi, belum ada klasifikasi uraian tugas pokok, dan belum berperannya Sekretariat KPAD dalam pengelolaan program, 4) Belum semua anggota laporan hasil kegiatan ke KPAD Kabupaten.

Disimpulkan bahwa KPAD didalam menjalankan tugas-tugas pokok belum memenuhi harapan KPA Pusat. Faktor penyebabnya adalah peran Sekretariat yang belum optimal, belum adanya pemberdayaan setiap anggota, dan belum adanya uraian tugas setiap anggotanya. Direkomendasikan penguatan kelembagaan KPAD Kabupaten melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kelompok Kerja (Pokja), deskripsi tugas, dan penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara para *stakeholder* instansi terkait anggota KPAD guna membangun kesefahaman bahwa masalah HIV/AIDS merupakan tanggung jawab bersama.

Kata Kunci : Tugas-tugas Pokok KPAD, Implementasi, Penanggulangan HIV/AIDS

Kepustakaan : 41 (1987-2007)

ABSTRACT

Rijadi Azikin

The Implementation of Primary Tasks of AIDS Control Commission on HIV/AIDS Controlling in Grobogan, 2009

x + 83 pages +15 tables + 3 figures + 3 enclosures

Ministry of internal affairs bylaw no.20, 2007, Unit II chapter 2 and verse 2 explained that in order to have more intensive, comprehensive and coordinative HIV/AIDS control in the district or city, District AIDS control commission (KPAD) should be created. Based on the Head of District decree no. 443.2/416/2007 dated April 23rd 2007, KPAD of Grobogan district was established. There were 6 main duties in controlling HIV/AIDS. Based on the documents review, Grobogan district KPAD had not done their primary tasks as expected.

Objective of this study was to explain implementation of primary tasks of Grobogan district KPAD in controlling HIV/AIDS. This was a non-experimental study and a qualitative study. Data were collected using in-depth interview to the Head Representative of KPAD and 9 members of Grobogan district KPAD. They were considered as the main informant. The second vice leader of KPAD and the first secretary of KPAD were included as triangulation informants.

The primary tasks of Grobogan district KPAD were: 1. To construct strategic plan for HIV/AIDS prevention and control in the Grobogan district for the years 2008-2012. It had been socialized to all members of KPAD but no consensus reached yet to support the realization of the strategic plan. 2. Education and distribution of HIV/AIDS information had not been actively supported by other KPAD members, 3. The formation of Working Group had not been realized, no classification of the main duty details, KPAD secretary in HIV/AIDS program management had not performed his/her duties. 4. Not all members of KPAD reported the results of their activities to the District KPAD.

In conclusion, KPAD had not performed their primary tasks as expected by the national KPA (AIDS control commission). The causing factors identified were the role of KPAD secretary was not optimum, no empowerment of every member of KPAD and no details of the duties (clear job descriptions) for each member. It was recommended to strengthen internal KPAD organization by constructing Standard Operating Procedure (SOP) for working groups (Pokja), description of the duties, building communication mechanism and coordination among stakeholders of the KPAD members related institutions to create understanding that HIV/AIDS problems were mutual responsibilities.

Key words : Primary tasks of KPAD, implementation, HIV/AIDS control

Bibliography : 41 (1987-2007)